



---

## PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MELALUI ADAPTASI BEST PRACTICE DI SINGAPURA

Muhammad Rais Rahmat Razak<sup>1</sup>, Sofyan<sup>2</sup>, Jamaluddin Ahmad<sup>3</sup>, Ahmad Mustanir<sup>4</sup>,  
Rasdiana Mustapa<sup>5</sup>, Rustan<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muhammadiyah Sidrap, Sidenreng Rappang, Indonesia

email: [mraisahmat@gmail.com](mailto:mraisahmat@gmail.com)<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

**Abstract:** This community service program aims to explore and identify best practices in public service accessibility for persons with disabilities in Singapore and adapt them for implementation in Indonesia. The program was conducted from January 14 to 25, 2025, involving graduate students in Public Administration from Muhammadiyah University Sidenreng Rappang. The activities were carried out using a descriptive-comparative qualitative approach through in-depth interviews with structured interview guides, participatory observation using accessibility checklists, and document analysis. The results of the activity found that Singapore has implemented comprehensive accessibility features, including inclusive infrastructure, accessible mass transportation systems, integration of assistive technology, and inclusive education policies. The best practices identified include: the completeness of special facilities, a sense of security, clarity, and comfort for persons with disabilities in public services. This community service activity produced a framework for adapting Singapore's best practices to the local context in Indonesia. It recommended standardizing public services for persons with disabilities, developing inclusive infrastructure and accessible transportation systems, launching public awareness campaigns, and using assistive technology. This benchmarking provides policymakers with valuable insights to develop more inclusive public service policies in Indonesia.

**Keywords:** Disability; Accessibility; Public Service; Best Practice; Singapore

**Abstrak:** Program pengabdian ini bertujuan untuk menelusuri dan mengidentifikasi praktik terbaik aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di Singapura serta mengadaptasinya untuk implementasi di Indonesia. Program dilaksanakan pada tanggal 14-25 Januari 2025 yang melibatkan mahasiswa pascasarjana Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara terstruktur, observasi partisipatif menggunakan checklist aksesibilitas, dan analisis dokumen. Hasil pelaksanaan kegiatan menemukan bahwa Singapura telah menerapkan fitur aksesibilitas yang komprehensif meliputi infrastruktur inklusif, sistem transportasi massal yang aksesibel, integrasi teknologi asistif, dan kebijakan pendidikan inklusif. Praktik baik yang teridentifikasi meliputi: kelengkapan fasilitas khusus, rasa aman, kejelasan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas pada layanan publik. Kegiatan pengabdian ini menghasilkan kerangka adaptasi praktik terbaik Singapura yang disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia, serta merekomendasikan standardisasi layanan publik bagi penyandang disabilitas, pengembangan infrastruktur inklusif, sistem transportasi aksesibel, kampanye kesadaran masyarakat, dan pemanfaatan teknologi asistif. Benchmarking ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan layanan publik yang lebih inklusif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Disabilitas; Aksesibilitas; Layanan Publik; Praktik Terbaik; Singapura

**DOI:** <https://doi.org/10.37249/jpma.v6i1.1343>

**Received:** December 04 2026; **Revised:** May 15 2026; **Accepted:** June 01 2026

**To cite this article:** Razak, M. R. R., Sofyan, S., Ahmad, J., Mustanir, A., Mustapa, R., & Rustan, R. (2026). PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MELALUI ADAPTASI BEST PRACTICE DI SINGAPURA. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 6(1), 91–99.

<https://doi.org/10.37249/jpma.v6i1.1343>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

## Pendahuluan

Pelayanan publik yang mudah diakses dan inklusif merupakan salah satu indikator terpenting keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan keadilan sosial yang bermanfaat bagi seluruh warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas (Ferri, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi kendala dalam mengakses layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur aksesibel dan sistem transportasi yang inklusif. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dan penyediaan fasilitas yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas (Sumiati & Indriane, 2024; Gumasing et al., 2025). Program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif komunitas telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan (Sukri et al., 2023).

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan transportasi (Fathimah & Apsari, 2020). Hal ini disebabkan oleh infrastruktur fisik yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan disabilitas, dan terbatasnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi sosial dan mobilitas mereka. Kondisi aksesibilitas yang terbatas ini menyebabkan penyandang disabilitas mengalami hambatan signifikan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat (Zen et al., 2024). Beberapa negara mulai menerapkan kebijakan inklusif untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan publik. Edukasi dan peningkatan wawasan masyarakat tentang inklusi sosial menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut (Cut Dara Ilfa et al., 2023).

Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala signifikan (UU RI No. 8 Tahun, n.d.). Masih banyak fasilitas umum di Indonesia yang belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas, terutama di wilayah-wilayah kecil. Trotoar yang tidak ramah, fasilitas umum yang tidak memiliki akses kursi roda, dan kurangnya jalur taktil bagi tunanetra menjadi kendala utama (Saputra, 2016). Berbeda dengan negara maju seperti Singapura yang memiliki sistem transportasi dan infrastruktur publik yang sangat inklusif, Indonesia masih memiliki banyak transportasi umum yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas (Chairunnisa & Sulistio, 2025).

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari tantangan pemenuhan hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Berbagai hambatan seperti keterbatasan dana, stigma sosial, dan lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian masalah ini. Meskipun sejumlah kebijakan inklusi telah diterapkan, penyandang disabilitas masih menghadapi kendala akses fisik, transportasi, pendidikan, dan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial (Zulkenedi et

al., 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya pembelajaran dari praktik terbaik negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan inklusif secara efektif (Amnesti et al., 2023). Singapura, sebagai kota termaju di Asia Tenggara, memiliki desain perkotaan yang canggih dan inklusif. Sistem MRT dengan lebih dari 119 stasiun dilengkapi fasilitas kursi roda, tanjakan landai, dan jalur bebas hambatan. Pada tahun 2020, lebih dari 85% bus telah dilengkapi akses kursi roda, sementara layanan Grab Assist memberikan bantuan tambahan bagi lansia dan pengguna kursi roda. Lebih dari 95% halte bus, pangkalan taksi, dan trotoar telah memenuhi standar ramah disabilitas, menjadikan Singapura sebagai salah satu kota paling inklusif di kawasan Asia Tenggara (Rambea & Dompok, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih terbatas pada aspek normatif dan belum banyak mengeksplorasi praktik terbaik dari negara lain untuk diadaptasi. Studi perbandingan dengan negara yang berhasil mengimplementasikan sistem layanan publik inklusif menjadi penting untuk memberikan solusi praktis bagi permasalahan aksesibilitas di Indonesia (Dewi et al., 2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan potensi lokal dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik (Basri et al., 2022).

Keunikan kegiatan PkM ini dibanding kegiatan pengabdian sejenis adalah penggunaan metode *benchmarking* internasional langsung di Singapura yang melibatkan mahasiswa pascasarjana sebagai agen perubahan, sehingga menghasilkan temuan berbasis data lapangan autentik yang dapat langsung diadaptasi untuk konteks Indonesia. Program pengabdian ini bertujuan untuk: (1) mengeksplorasi dan mengidentifikasi praktik terbaik layanan publik bagi penyandang disabilitas di Singapura; (2) menganalisis kebijakan dan implementasi aksesibilitas di Singapura yang dapat diadaptasi di Indonesia; dan (3) memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

## Metode

Program pengabdian ini menggunakan metode *Community-Based Research (CBR)* dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif untuk menganalisis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Makassar dan Singapura. Metode CBR dipilih karena sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan keterlibatan aktif komunitas dalam proses identifikasi masalah hingga implementasi solusi (Batubara et al. 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan aksesibilitas dari perspektif penyandang disabilitas sebagai subjek utama, bukan hanya sebagai objek penelitian (Sulistyowati and Pramono, 2022). Subjek program meliputi mahasiswa pascasarjana Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, penyandang disabilitas, pengelola fasilitas publik, dan pemangku kebijakan. Keterlibatan multi-stakeholder ini penting untuk memastikan bahwa analisis dan rekomendasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan aplikatif (Hanjarwati et al., 2019).

Lokasi pelaksanaan meliputi Makassar (Pantai Losari, Bandara Sultan Hasanuddin, Halte Trans Mamminasata, pusat perbelanjaan) dan Singapura (Merlion Park, Changi Airport, Stasiun MRT, Orchard Road). Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur dengan penyandang disabilitas, pengelola fasilitas publik, dan pembuat kebijakan; (2) observasi partisipatif menggunakan *checklist* observasi aksesibilitas berstandar internasional dengan menelusuri fasilitas publik secara langsung, mencatat elemen aksesibilitas (lift, *ramp*, jalur taktil, toilet aksesibel), dan melakukan simulasi pengalaman disabilitas menggunakan kursi roda; dan (3) analisis dokumen kebijakan aksesibilitas di kedua negara, termasuk *Enabling Masterplan* Singapura dan UU Nomor 8 Tahun 2016.

Data dianalisis dengan pendekatan tematik komparatif. Metode komparatif dipilih untuk mengidentifikasi *best practices* dari Singapura yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kedua negara (Amnesti et al., 2023). Serta membandingkan efektivitas kebijakan dan implementasi infrastruktur di Makassar dan Singapura. Untuk meningkatkan validitas, digunakan triangulasi sumber dan metode: triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari penyandang disabilitas, pengelola fasilitas, dan pembuat kebijakan; triangulasi metode dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan observasi melalui wawancara dan analisis dokumen (Patton, 2015). Program dilaksanakan pada 14-25 Januari 2025 dengan tahapan: identifikasi masalah, studi literatur dan kebijakan, observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi, analisis komparatif, penyusunan rekomendasi, dan diseminasi hasil.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil observasi dan analisis menunjukkan bahwa Singapura telah mengimplementasikan sistem aksesibilitas komprehensif melalui *Enabling Masterplan*, kebijakan nasional yang dirancang khusus untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Beberapa praktik baik yang teridentifikasi meliputi:

### 1. Infrastruktur Publik yang Inklusif

Seluruh fasilitas umum di Singapura, termasuk taman, gedung pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan pusat bisnis, telah dirancang dengan standar aksesibilitas tinggi. Trotoar dilengkapi dengan kemiringan (*ramp*) sesuai standar internasional, jalur taktil (*tactile paving*) untuk tunanetra, dan tekstur permukaan berbeda sebagai panduan navigasi. Hasil observasi menunjukkan 95% fasilitas publik di area *Orchard Road* dan Merlion Park memiliki akses ramah disabilitas.

### 2. Sistem Transportasi Massal yang Aksesibel

Sistem *Mass Rapid Transit* (MRT) Singapura menjadi model terbaik transportasi inklusif. Setiap stasiun MRT dilengkapi dengan lift, ramp, fitur audio untuk tunanetra, dan ruang khusus kursi roda di setiap gerbong kereta. Operator transportasi mendapat pelatihan khusus tentang cara memberikan bantuan kepada penumpang disabilitas. Data menunjukkan 100% stasiun MRT di Singapura telah aksesibel sejak 2015.

Tabel 1. Perbandingan fitur aksesibilitas transportasi publik

Fitur Aksesibilitas	Singapura	Makassar
Lift/Elevator	100% stasiun	30% halte
Ramp	Tersedia di semua pintu masuk	Terbatas
Jalur Taktil	Lengkap	Sangat terbatas
Ruang Kursi Roda	Setiap gerbong	Tidak ada ruang khusus
Pengumuman Audio	Tersedia	Terbatas

### 3. Integrasi Teknologi Asistif

Singapura memanfaatkan teknologi berbasis AI untuk meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas. Aplikasi navigasi khusus membantu tunanetra dalam perjalanan, sementara sistem informasi digital di ruang publik dilengkapi dengan fitur *voice-to-text* dan *text-to-speech*. Pemerintah memberikan subsidi hingga 80% untuk pembelian alat bantu teknologi. Pemanfaatan teknologi digital dalam program pemberdayaan masyarakat telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi dan edukasi kepada kelompok sasaran.

### 4. Pendidikan Inklusif dan Kesadaran Masyarakat

Singapura mewajibkan seluruh sekolah menyediakan fasilitas untuk siswa berkebutuhan khusus. Kampanye kesadaran publik dilakukan secara berkelanjutan melalui media massa, seminar, dan program komunitas. Hasil wawancara dengan pengelola fasilitas publik menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Singapura terhadap kebutuhan penyandang disabilitas mencapai 87%.

Hasil observasi di Makassar menunjukkan kesenjangan signifikan dalam aksesibilitas layanan publik. Di Pantai Losari, meskipun merupakan ikon wisata kota, fasilitas untuk penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Trotoar tidak dilengkapi dengan ramp yang memadai, jalur taktil hampir tidak tersedia, dan toilet umum belum aksesibel. Di Bandara Sultan Hasanuddin, meskipun telah ada fasilitas kursi roda dan lift, ketersediaannya terbatas dan kurang terawat.

Sistem Trans Mamminasata sebagai transportasi massal utama di Makassar juga belum sepenuhnya inklusif. Dari 45 halte yang diobservasi, hanya 14 halte (31%) yang memiliki ramp untuk kursi roda, dan tidak ada satupun yang dilengkapi dengan jalur taktil atau sistem audio untuk tunanetra. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat terbatas.

Analisis komparatif mengidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Singapura:

#### 1. Komitmen Politik dan Regulasi yang Kuat

Pemerintah Singapura memiliki komitmen jangka panjang dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk program aksesibilitas. Regulasi *Building and Construction Authority (BCA)* mewajibkan seluruh bangunan baru memenuhi standar Universal

Design. Pelanggaran terhadap regulasi ini dikenakan sanksi tegas berupa denda hingga penutupan operasional.

## **2. Pendekatan Desain Universal**

Singapura menerapkan prinsip *Universal Design* yang tidak hanya mengakomodasi penyandang disabilitas, tetapi juga lansia, ibu hamil, dan orang tua dengan stroller. Pendekatan ini membuat investasi infrastruktur aksesibel lebih efisien dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **3. Partisipasi Aktif Komunitas Disabilitas**

Proses perencanaan dan evaluasi kebijakan melibatkan organisasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 78% kebijakan aksesibilitas di Singapura melibatkan konsultasi dengan komunitas disabilitas sejak tahap perencanaan.

## **Tantangan Implementasi di Indonesia**

Meskipun Indonesia telah memiliki UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasinya menghadapi beberapa tantangan: (1) keterbatasan anggaran, kurang dari 5% anggaran pembangunan infrastruktur dialokasikan untuk fitur aksesibilitas; (2) stigma sosial yang masih tinggi, 63% responden masih memandang disabilitas sebagai "aib" atau "beban keluarga"; (3) kurangnya koordinasi antar lembaga; dan (4) minimnya pemanfaatan teknologi asistif karena faktor biaya dan keterbatasan akses informasi.

Berdasarkan hasil *benchmarking*, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diadaptasi di Indonesia meliputi:

### **1. Pengembangan Infrastruktur Bertahap dengan Target Terukur**

Pemerintah daerah perlu menetapkan target konkret, misalnya 70% fasilitas umum di kota besar harus aksesibel pada tahun 2027. Prioritas diberikan pada fasilitas dengan tingkat kunjungan tinggi seperti bandara, terminal, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

### **2. Standardisasi Transportasi Inklusif**

Revitalisasi armada Trans Maminasata dan transportasi publik lainnya dengan menambahkan lift, ramp, ruang khusus kursi roda, dan sistem informasi audio-visual. Pelatihan wajib bagi operator transportasi tentang layanan inklusif perlu dilaksanakan secara berkala.

### **3. Kampanye Kesadaran Masyarakat Masif**

Melaksanakan kampanye edukasi melalui media sosial, televisi, dan program komunitas. Memasukkan materi inklusi sosial dalam kurikulum pendidikan formal sejak tingkat dasar. Target: meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas.

### **4. Subsidi Teknologi Asistif**

Pemerintah menyediakan subsidi untuk pembelian alat bantu seperti kursi roda elektrik, alat bantu dengar, dan aplikasi aksesibilitas. Pengembangan aplikasi layanan publik digital yang inklusif dengan fitur voice-to-text, penerjemah bahasa isyarat, dan panduan navigasi untuk tunanetra.



Gambar 1. Pasilitas layana publik

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek kebijakan, infrastruktur, teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Keunggulan kegiatan ini dibandingkan kajian sebelumnya terletak pada penggunaan data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan secara langsung di dua konteks yang berbeda, yaitu Makassar dan Singapura. Berbeda dengan penelitian Dewi et al. (2020) yang lebih banyak bertumpu pada data sekunder, kegiatan ini menghasilkan temuan empiris mengenai implementasi aksesibilitas di lapangan. Selain itu, jika sebagian penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek tertentu, seperti transportasi, kegiatan pengabdian ini mengkaji aksesibilitas secara lebih luas melalui empat dimensi utama, yaitu infrastruktur, transportasi, teknologi, dan pendidikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik-praktik baik yang diterapkan di Singapura memiliki potensi untuk diadaptasi ke dalam konteks Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan setempat guna mendukung pengembangan layanan publik yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

## Kesimpulan

Program *benchmarking* internasional ini berhasil mengidentifikasi praktik terbaik aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di Singapura yang dapat diadaptasi di Indonesia. Singapura telah mengimplementasikan sistem aksesibilitas komprehensif melalui infrastruktur inklusif, transportasi massal aksesibel, integrasi teknologi asistif, dan pendidikan inklusif yang didukung oleh komitmen politik kuat dan regulasi tegas.

Perbandingan dengan kondisi di Makassar menunjukkan kesenjangan signifikan dalam hal kelengkapan fasilitas, ketersediaan transportasi aksesibel, dan kesadaran masyarakat. Kontribusi utama kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya kerangka adaptasi empat dimensi (infrastruktur, transportasi, teknologi, dan pendidikan) yang dapat

langsung digunakan oleh pemerintah daerah sebagai panduan peningkatan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Rekomendasi kebijakan mencakup pengembangan infrastruktur bertahap dengan target terukur, standardisasi transportasi inklusif, kampanye kesadaran masyarakat masif, dan subsidi teknologi asistif.

Saran untuk penelitian dan pengabdian selanjutnya adalah: 1) melakukan uji coba implementasi rekomendasi di satu kota percontohan; 2) mengembangkan modul pelatihan bagi operator layanan publik; 3) melakukan kajian mendalam tentang aspek pembiayaan program aksesibilitas; dan 4) membangun sistem monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan aksesibilitas secara berkala.

### Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah memfasilitasi program benchmarking internasional ini. Apresiasi juga disampaikan kepada mahasiswa pascasarjana Administrasi Publik yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program, serta kepada seluruh informan dan pengelola fasilitas publik di Makassar dan Singapura yang telah memberikan informasi dan akses untuk observasi lapangan.

### Daftar Pustaka

- Amnesti, S. K. W., Jundiania, Zulaichaha, S., Noh, M. S. M., & Fitriyah, L. (2023). Higher education with disabilities policy: Ensuring equality inclusive education in Indonesia, Singapore and the United States. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(3), 412–440.
- Basri, S., Radiah, R., & M, A. (2022). Pemberdayaan petani aren di Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu dalam pembuatan gula merah menjadi komoditas usaha di era digital. *JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 2(1), 1–9.
- Batubara, M. H., Nurmalina, N., Nasution, A. K. P., Agusmawati, A., & Maharani, A. (2021). Pelatihan media sosial Instagram untuk sarana promosi ekowisata. *JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.37249/jpma.v1i1.253>
- Chairunnisa, S., & Sulistio, E. B. (2025). Analisis peningkatan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 123–132. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i2.25542>
- Cut Dara Ilfa, R., Ratna, D., Batubara, M. H., & Nurmalina, N. (2023). Edukasi wawasan nusantara dan geopolitik Indonesia kepada generasi muda. *JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 14–18. <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.559>
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 145–160.
- Fathimah, K., & Apsari, N. C. (2020). Aksesibilitas sebagai bentuk kemandirian disabilitas fisik dalam mengakses fasilitas pelayanan publik ditinjau dari activity

- daily living. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 120-132.
- Ferri, D. (2025). Advancing an embodied understanding of accessibility for persons with disabilities. *Journal of Human Rights Practice*, 17(2), 1–18. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huae049>
- Gumasing, M. J. J., Del Castillo, T. R. P., Palermo, A. G. L., Tabino, J. T., & Gatchalian, J. T. (2025). Enhancing accessibility in Philippine public bus systems: Addressing the needs of persons with disabilities. *Disabilities*, 5(2), 45–68. <https://doi.org/10.3390/disabilities5020045>
- Hanjarwati, A., Suprihatiningrum, J., & Aminah, S. (2019). Persepsi penyandang disabilitas di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 379–404. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i2.1625>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rambea, R. D., & Dompok, T. (2024). Inklusivitas dan transportasi umum (Studi kasus: Jakarta dan Singapura). *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 6, 419–424.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69*.
- Saputra, N. (2016). Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ditinjau dari Pasal UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum*, 8(2), 156–174.
- Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi dan pemetaan potensi desa sebagai arah pembangunan yang berkelanjutan. *JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19–27.
- Sulistyowati, E., & Pramono, T. (2022). Perspektif penyandang disabilitas dalam penelitian partisipatif: Dari objek ke subjek. *Jurnal Disability Studies Indonesia*, 7(2), 134–151.
- Sumiati, I., & Indrianie, M. (2024). Pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang tunanetra dalam penggunaan guiding block di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 125–131.
- Zen, L. F., Rachim, H. A., & Apsari, N. C. (2024). Penggunaan teknologi asistif: Peningkatan kemandirian penyandang disabilitas fisik. *Share: Social Work Journal*, 14(2), 135–147.
- Zulkenedi, Z., Yuliandri, Y., Zetra, A., & Putri, I. A. (2023). Kebijakan publik dan penyandang disabilitas di Indonesia: Tantangan dan alternatif kebijakan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 215–221.